

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan kantor dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum, kehadirannya sangat memberikan warna terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah dalam bidang pekerjaan umum.

Kantor merupakan bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan pengendalian kegiatan pengolahan data atau informasi, yang dalam operasionalnya memerlukan kantor sebagai tempat konsentrasi pimpinan dan pegawai untuk melakukan aktivitas manajemen. Setiap kantor memerlukan fasilitas ruang untuk penyusunan tempat kerja dan alat perlengkapan kantor yang baik agar pegawai betah dalam bekerja dan produktif. Kantor sebagai tempat diselenggarakannya pekerjaan dinas di dalamnya terdapat pegawai, perabotan kantor, mesin kantor, dan alat-alat kantor. Tata ruang kantor tidak hanya menempatkan perlengkapan dan peralatan pada suatu kantor, tetapi tata ruang kantor harus dapat digunakan untuk mengatur dan memudahkan pergerakan alur kerja pegawai dari satu ruangan keruangan yang lain.

Labuha merupakan salah satu Kota yang terletak di Kecamatan Bacan dan menjadi Ibukota dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Perkotaan Labuha secara geografis terletak di pantai selatan Pulau Bacan. Sebagai Ibukota Kabupaten, Labuha tentunya memiliki peran penting dalam penyediaan fasilitas untuk menunjang pembangunan daerah salah satunya penyediaan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penyelenggara urusan Pemerintah di bidang infrastruktur daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibuatlah sebuah Perancangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Pendekatan Arsitektur Futuristik yang diharapkan dapat mewadahi proses

administrasi, pengelolaan, pengawasan dan pelaksanaan di bidang pembangunan infrastruktur daerah.

Untuk menunjang agar kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berfungsi sebagai kantor ideal harus ada tinjauan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar. Instansi pemerintah memiliki SK No: 29/PRT/M/2006 yang menitik beratkan sebuah kantor kepada persyaratan yang berhubungan fisik bangunan kantor, prasarana kantor, dan penyesuaian dengan persyaratan tata ruang kota karena persyaratan kantor ini menyatu dengan persyaratan gedung secara umum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana merancang kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan dengan Pendekatan Arsitektur Futuristik.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Perancangan

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari Perancangan ini adalah:

- a. Untuk merancang kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penyelenggara urusan Pemerintah di bidang infrastruktur.

1.3.2 Manfaat Perancangan

Berdasarkan tujuan diatas maka manfaat perancangan sebagai berikut:

1. Menambah wawasan mengenai ilmu arsitektur khususnya Perancangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Menambah wawasan mengenai ilmu merancang bangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang ramah terhadap lingkungan

1.4 Ruang Lingkup Perancangan

Ruang lingkup Perancangan Kantor Dinas PUPR Labuha ini meliputi pada penciptaan bangunan baru yang sesuai konsep-konsep perancangan yang menitikberatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, seperti aspek fungsional, teknis, kinerja, kontekstual, dan arsitektural.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat perancangan, ruang lingkup perancangan dan sistematika penulisan serta kerangka pikir, yang disusun secara sistematis.

BAB II Tinjauan Teori

BAB II Tinjauan Teori, menguraikan tentang pengertian objek rancangan, penggunaan literatur dan teori-teori arsitektur, serta studi literatur.

BAB III Metode Perancangan

BAB III Metode Perancangan, menguraikan tentang tahapan-tahapan dalam proses perancangan guna menghasilkan objek rancangan yang sesuai dengan target yang ingin dicapai, meliputi uraian lokasi perancangan, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta konsep perancangan dan kerangka pikir.

BAB IV Tinjauan Objek Rancangan

BAB IV Tinjauan Objek Rancangan, menguraikan tentang penentuan lokasi perancangan dan tinjauan khusus.

BAB V Analisis Dan Konsep Perancangan

BAB V Analisis Dan Konsep Perancangan, menguraikan tentang tahapan-tahapan dalam menganalisis data sehingga menghasilkan konsep yang sesuai dengan tinjauan perancangan.

BAB VI Penutup

BAB VI Kesimpulan dan Saran, menguraikan tentang hasil dari keseluruhan penulisan dan rekomendasi atau saran dari rancangan kantor Dinas PUPR.